

KONSEP MULTIKULTURALISME DAN PLURALISME DALAM PENDIDIKAN AGAMA

(Upaya Menguniversalkan Pendidikan Agama dalam Ranah Keindonesiaan)

*Muhandis Azzuhri**

Abstract: Multiculturalism and pluralism are characters that could not be denied in the education system of Indonesia, especially in religious education. Through that concept, a sense of unity within the realm of *ukhuwah basyariyah* in promoting and improving the quality of education will be established; therefore the educational system which makes religion as moral values and not as formal institutional is formed.

Kata Kunci: Multikulturalisme, Pluralisme, Pendidikan Agama

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau "plural society", (Nasikun, 1989: 31) bahkan ada yang menyebut "dual society". Kemajemukan masyarakat Indonesia disebabkan oleh keadaan intern tanah air dan bangsa Indonesia sendiri. Faktor-faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia adalah : (1) keadaan geografis, yang merupakan faktor utama terciptanya pluralitas suku bangsa. Wilayah Indonesia terdiri dari kurang lebih 3000 mil dari Timur ke Barat dan lebih dari 1000 mil dari Utara ke Selatan. (2) Indonesia terletak antara samudera Indonesia dan Samudera Pasifik, sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh pertama kali yang menyentuh masyarakat Indonesia berupa pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha dari India sejak 400 tahun sesudah Masehi". Pengaruh agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang pluralistic (Ichtiyanto, 2005: 47-48).

* Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, e-mail: muhandis

Pluralisme merupakan salah satu ciri dari multikulturalisme. Dua ciri lainnya ialah adanya cita-cita mengembangkan rasa kebangsaan yang sama dan kebanggaan untuk terus mempertahankan kebhinekaan itu. Secara konstitusional, Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat multikultural. Faktanya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, baik berkaitan dengan soal-soal kebangsaan maupun keagamaan. Memerlukan tiga pilar utama untuk menuju masyarakat multikultural tersebut.

Pertama, ialah adanya para pengambil kebijakan publik yang adil yang mampu mengantisipasi dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh kebijakan publik yang akan diambilnya. *Kedua*, ialah adanya para pemimpin agama yang berwawasan kebangsaan yang luas dan lebih mengedepankan agama sebagai nilai daripada agama institusional. *Ketiga*, ialah adanya masyarakat yang berpendidikan dan rasional dalam menyikapi keragaman keagamaan (*religious market*) dan perubahan sosial (M. Atho Mudzhar, 2005: 18-19).

Terjadinya beberapa peristiwa SARA beberapa bulan lalu, misalnya kasus Sunni–Syiah di Sampang Madura bukan merupakan faktor agama atau ideologi tertentu melainkan oleh berbagai sebab yang saling terkait. Agama biasanya dibawa serta sebagai faktor legitimasi atau untuk menutupi konflik yang sesungguhnya. *Pertama*, krisis di berbagai bidang yang terjadi beberapa tahun yang lalu, pada akhirnya selain menciptakan hilangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat pemerintah yang terlanjur bertahun-tahun menunjukkan sikap kurang simpatik sebagian masyarakat, juga memunculkan sikap saling curiga yang tinggi antarberbagai kelompok masyarakat. *Kedua*, akibat arus globalisasi informasi, berkembang pula paham keagamaan yang semakin menciptakan eksklusifitas dan sensitifitas kepentingan kelompok. *Ketiga*, kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik.

Padahal Al-Qur'an (dalam perspektif ajaran Islam), pada abad ketujuh telah menggunakan istilah: "*Bagimu agamamu dan bagiku agamaku*" (QS. Al-Kafirun: 6), "*Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah"*. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada

mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)" (QS Ali Imran: 64), "Tidak ada paksaan dalam agama" (QS. al-Baqarah: 256).

MULTIKULTURALISME DAN PLURALISME DALAM TINJAUAN SEJARAH

Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut (M. Atho Mudzhar, 2005: 174).

Sejarah multikulturalisme adalah sejarah masyarakat majemuk. Amerika, Kanada, dan Australia adalah dari sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori multikulturalisme dan juga pendidikan multikultur. Ini dikarenakan mereka adalah masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya, dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sebelumnya, atau kultur nenek moyangnya.

Dalam sejarahnya, multikulturalisme diawali dengan teori *melting pot* yang sering diwacanakan oleh J Hector seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya Hector menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika, walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur *White Anglo Saxon Protestant* (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa.

Kemudian, ketika komposisi etnik Amerika semakin beragam dan budaya mereka semakin majemuk, maka teori *melting pot* kemudian dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama *salad bowl* sebagai sebuah teori alternatif dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan *melting pot* yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, Teori *salad bowl* atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya

asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar *White Anglo Saxon Protestant* (WASP) diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional.

Pada akhirnya, interaksi kultural antar berbagai etnik tetap masing-masing memerlukan ruang gerak yang leluasa, sehingga dikembangkan teori *Cultural Pluralism*, yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Dalam konteks ini, mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika. Akan tetapi, mereka juga memiliki ruang privat, yang di dalamnya mereka mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa.

Bangsa Amerika berupaya memperkuat bangsanya, membangun kesatuan dan persatuan, mengembangkan kebanggaan sebagai orang Amerika. Namun pada dekade 1960-an masih ada sebagian masyarakat yang merasa hak-hak sipilnya belum terpenuhi. Kelompok Amerika hitam, atau imigran Amerika latin atau etnik minoritas lainnya merasa belum terlindungi hak-hak sipilnya. Atas dasar itulah, kemudian mereka mengembangkan *multiculturalism*, yang menekankan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dilihat dari segi etnik, agama, ras atau warna kulit (M. Atho Mudzhar, 2005: 180-183).

Multikulturalisme pada akhirnya sebuah konsep akhir untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang etnik, agama, ras, budaya dan bahasa, dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Sikap apresiatif tersebut akan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam membesarkan sebuah bangsa, karena mereka akan menjadi besar dengan kebesaran bangsanya, dan mereka akan bangga dengan kebesaran bangsanya itu.

Sedangkan multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.

Dalam konsep multikulturalisme Indonesia, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan *bhineka tunggal ika* serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat.

Dengan demikian multikulturalisme di Indonesia menyediakan wadah untuk penampakan “yang lain”. Kehadiran “yang lain” itu harus dipahami tanpa reduksi, atau distorsi. “Yang lain” itu harus tampil dalam soliditas dan keutuhannya masing-masing. Identitas adalah fakta yang eksotis dan dengan demikian mustahil digeneralisasi atau disimplifikasi. Perbedaan diterima sebagai sarana relasi, bukan ancaman desktruktif atau dijadikan alasan untuk menjalankan represi (Susi Fitri, 2005: th).

Adapun sejarah pluralisme muncul pada masa yang disebut masa pencerahan (*Enlightenment*) Eropa, tepatnya pada abad 18 Masehi. Masa yang disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern. Yaitu masa yang diwarnai dengan dengan wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal (rasional) (Ahmad Zaki Nuhaiz, 2005: th).

Secara etimologi pluralisme yang bahasa Arab diterjemahkan *ta'addud*, dalam bahasa Inggris *pluralism*. Pluralisme berarti banyak atau lebih dari satu. Dalam kamus bahasa Inggris mempunyai 3 pengertian. *Pertama*; pengertian kegerejaan: 1. Sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan; 2. Memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan atau tidak kegerejaan. *Kedua*; pengertian filosofis; berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. Sedangkan *ketiga*; pengertian sosio-politis: adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran, partai maupun agama dengan menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik diantara kelompok-kelompok tersebut (Anis Malik Toha, 2005: 14).

Ketiga pengertian tersebut sebenarnya bisa disederhanakan dalam satu makna, yaitu koeksistensinya berbagai kelompok atau keyakinan di satu waktu dengan tetap terpeliharanya perbedaan dan karakteristiknya masing-masing.

Sedangkan istilah pluralisme agama yang sekarang mewacana merupakan upaya meningkatkan kerukunan umat beragama agar dapat hidup bersama (koeksistensi) antar agama (dalam arti yang luas) yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama (Anis Malik Toha, 2005: 14).

Pluralisme agama mengimplikasikan pengakuan terhadap fondasi bersama bagi seluruh varietas pencarian agama dan konvergensi atas agama-agama dunia. Bagi sebagian lainnya, pluralisme mengimplikasikan saling penghargaan di kalangan berbagai pandangan dunia dan mengakui sepenuhnya perbedaan tersebut. Kedua ragam itu mendukung toleransi. Yang pertama menekankan kebebasan beragama individu, sementara kedua menekankan pengakuan atas denominasi sebagai pemberi jawaban khas (M. Atho Mudzhar, 2005: 14-15).

Pluralisme agama pada level individu mempunyai beberapa bentuk. Ia diartikulasi dalam hak-hak individu untuk memilih terikat atau tidak terikat dengan suatu denominasi. Ia juga berarti hak untuk memformulasi pandangan hidupnya, dengan memilih atau mencampuri unsur-unsur sistem kepercayaan agama sesuai dengan pilihannya. Dalam sosiologi agama meminjam istilah Bibby, proses ini disebut sebagai "*religion a la carte*" atau "*bricolage*" keagamaan (Zakiyuddin Baidhaw, 2002: 19-20).

MULTIKULTURALISME DAN PLURALISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Multikulturalisme dan Pluralisme adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini. Allah menciptakan alam ini di atas *sunnah* multikultural dan pluralitas dalam sebuah kerangka kesatuan. Isu multikulturalisme dan pluralisme adalah setua usia manusia dan selamanya akan ada selama kehidupan belum berakhir, hanya saja bisa terus menerus berubah, sesuai perkembangan zaman.

Multikultural dan Pluralitas pada hakikatnya merupakan realitas kehidupan itu sendiri, yang tidak bisa dihindari dan ditolak. Karena multikultural dan pluralitas merupakan *sunnatullah*, maka eksistensi atau keberadaanya harus diakui oleh setiap manusia. Namun pengakuan ini dalam tataran realitas belum sepenuhnya seiring dengan pengakuan secara teoritik dan kendala-kendala masih sering dijumpai di lapangan. Wacana tersebut sering dijumpai di

dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang kemajemukan masyarakat seperti dalam QS al-Hujurat:13 berikut ini.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات: ١٣)

Artinya: *Wahai umat manusia, sesungguhnya, Kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang bertaqwa.*

Karena pluralitas merupakan bagian dari multikultural, maka pluralisme diartikan sebagai "menerima perbedaan" atau "menerima perbedaan yang banyak". Dalam konteks penggunaan kata pluralitas dalam tulisan ini penulis mengartikannya sebagai keberagaman termasuk keberagaman agama.

Dalam kehidupan sehari-hari sebelum dicampuri dengan kepentingan ideologis, ekonomis, sosial-politik, agamis dan lainnya, manusia menjalani kehidupan yang bersifat pluralitas secara ilmiah, tanpa begitu banyak mempertimbangkan sampai pada tingkat "benar tidaknya" realitas pluralitas yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Baru ketika manusia dihadapkan dengan berbagai kepentingannya (organisasi, politik, agama, budaya dan lainnya) mulai mengangkat isu pluralitas pada puncak kesadaran mereka dan menjadikannya sebagai pusat perhatian. Maka pluralitas yang semula bersifat wajar, alamiah berubah menjadi hal yang sangat penting.

Seiring dengan maraknya proses liberalisasi sosial politik yang menandai lahirnya tatanan dunia abad modern, dan disusul dengan liberalisasi atau globalisasi (penjajahan model baru) ekonomi, wilayah agamapun pada gilirannya dipaksa harus membukakan diri untuk diliberalisasikan. Agama yang semenjak era reformasi gereja abad ke-15 wilayah yurisdiksinya telah direduksi, dimarjinalkan dan didomestikasikan sedemikian rupa, yang hanya boleh beroperasi disisi kehidupan manusia yang paling privat, ternyata masih dianggap tidak cukup kondusif (atau bahkan mengganggu) bagi terciptanya tatanan dunia baru yang harmoni, demokratis dan menjunjung tinggi

nilai-nilai kemanusiaan dan HAM seperti toleransi, kebebasan, persamaan, dan pluralisme. Seakan-akan semua agama secara general adalah musuh demokrasi, kemanusiaan, dan HAM. Sehingga agama harus mendekonstruksikan diri (atau didekonstruksikan secara paksa) agar, menurut bahasa kaum liberal, merdeka dan bebas dari kungkungan teks-teks dan tradisi yang jumud serta tidak sesuai lagi semangat zaman (Anis Malik Thoha, 2008: 65).

Padahal kalau dipahami secara arif, terminologi multikultural dan pluralisme sebenarnya sudah lama dikenal dalam pandangan Islam terutama dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi baru populer sejak kurang lebih dua dekade terakhir abad ke 20 yang lalu, yaitu ketika terjadi perkembangan penting dalam kebijakan internasional Barat yang baru yang memasuki sebuah fase yang dijuluki Muhammad Imarah sebagai "*marhalah al-Ijtiyāh*" (fase pembinasaan). Yaitu sebuah perkembangan yang prinsipnya tergarut dan tergambar jelas dalam upaya Barat yang habis-habisan guna menjajakan ideologi modernnya yang dianggap universal, seperti demokrasi, pluralisme, HAM, pasar bebas dan mengekspornya untuk konsumsi luar guna berbagai kepentingan yang beragam (Anis Malik Thoha, 2005: 180). Konsep pluralisme bersyarat disebutkan oleh Allah SWT dalam QS : al-Baqarah: 62.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالصَّامِرِيَّةَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: ٦٢)

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin (penyembah bintang), siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Secara sepintas ayat ini menunjuk kepada jaminan Allah atas keselamatan semua golongan yang disebutkan dalam ayat itu. Jika demikian halnya, dimana letak keistimewaan umat Islam kalau semuanya akan selamat? Lantas, bagaimana dengan surat Ali Imran: 85 yang berbunyi:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران: ٨٥)

Siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.

Dan Surat Ali Imran: 19 yang berbunyi:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: ١٩)

Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam

Pada dasarnya ayat di atas berbicara tentang empat kelompok: *aladzīna āmanū* (orang yang beriman), *aladzīna hādū* (umat yahudi), *al-nashārā* (umat Kristen), dan *al-shābiīn*). Para pakar tafsir menyadari kesulitan menafsirkan ayat ini, mengingat ayat-ayat lain menunjukkan hanya Islamlah yang dijanjikan keselamatan oleh Allah. Al-Thabari, ahli tafsir kenamaan abad kesepuluh yang banyak memberikan inspirasi buat ahli-ahli tafsir selanjutnya berpendapat bahwa jaminan Allah tersebut bersyaratkan tiga hal: beriman, percaya pada hari kemudian, dan perbuatan baik. Syarat beriman itu termasuk beriman kepada Allah dan Muhammad SAW atau dengan kata lain yang dimaksud dengan ayat ini adalah mereka yang telah memeluk Islam (At-Thabari, 2000: 143).

Sementara Fakhruddin al-Razhi, pakar tafsir abad kedua belas, sambil memperkuat pendapat Thabari menyatakan bahwa ketiga syarat yang dikemukakan dalam ayat tersebut tak lain adalah esensi ajaran Islam. Tak berbeda dengan Zamakhsari, pakar tafsir yang hidup pada abad kedua belas, ia tidak saja membatasi pada ketiga syarat di atas. Bahkan, lebih jauh lagi, ia menekankan bahwa dari kelompok pertama umat Islam juga ada yang belum memenuhi persyaratan tersebut. Sebab, di antara mereka ada yang beriman di mulut saja (munafik). Ibn Katsir yang hidup dua abad kemudian lain lagi pendapatnya. Ia seolah setuju dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ayat tersebut telah dinasikh (diganti) dengan turunnya ayat ke 85 surat al-Baqarah itu: *Hanya Islam yang diterima Allah sebagai agama yang diridhai* (Alwi Shihab, 1999: 78-90).

Penafsiran modern juga menunjukkan keragaman pandangan. Muhammad Abduh berpendapat bahwa syarat pertama, yakni

beriman kepada Allah SWT tidak harus dibatasi dengan keimanan menurut cara Islam. Rasyid Ridha murid Abduh memperkuat pendapat gurunya. Ia mengakui keimanan sejati kepada Allah dapat juga ditemukan di luar Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, mungkin yang dimaksudkan adalah orang-orang terdahulu yang beriman kepada Allah sebelum diutusnyanya Nabi Muhammad SAW.

Al-Thabathabai lain pula penafsirannya. Baginya, Allah tidak memandang pada agama tertentu tapi yang penting adalah substansi dan esensi yang terkandung dalam agama itu. Selama tiga syarat dalam ayat tersebut terpenuhi, janji tuhan itu akan terlaksana.

Pendapat Al-Thabathabai ini juga dapat dirasakan pada tulisan-tulisan Fazlurrahman dan yang sejalan dengannya, khususnya mereka yang berusaha untuk menunjukkan inklusivisme Islam. Jelas pakar tafsir terdahulu lebih menekankan pandangan eksklusivistik dan hati-hati. Karena itu, mereka membatasi hanya Islam sebagai satu-satunya agama yang akan mendapat jaminan keselamatan.

Kendati sebagian pakar tafsir modern memberi peluang adanya kemungkinan jaminan Allah kepada kelompok lain yang memenuhi syarat tersebut perlu dicatat sebagaimana ditegaskan oleh Sayyid Qutub salah seorang eksponen tafsir modern – validitas keimanan kelompok-kelompok selain Islam hanya terbatas pada masa pra-Muhammad saw.

Islam adalah agama yang memandang setiap penganutnya sebagai dai bagi dirinya sendiri dan orang lain. Karena Islam tidak menganut adanya hierarki religius, setiap Muslim bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri di hadapan Allah. Namun demikian, karena ajaran Islam bersifat universal dan ditujukan kepada seluruh umat manusia, kaum Muslim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa ajarannya sampai kepada seluruh manusia di sepanjang sejarah (Alwi Shihab, 1999: 82-83).

Agama Islam sebagai sebuah tatanan nilai, sebenarnya membutuhkan medium budaya agar keberadaannya membumi dalam kehidupan umat pemeluknya dan agama diharapkan menjadi institusi bagi pengalaman iman kepada sang Khaliq. Disini agama menawarkan agenda penyelamatan manusia secara universal, namun disisi yang lain agama sebagai sebuah kesadaran makna dan legitimasi tindakan bagi pemeluknya, dalam interaksi sosialnya banyak mengalami perbedaan hermeunetik sehingga tidak pelak memunculkan konflik.

Pluralitas agama di satu sisi, dan heterogenitas realitas sosial pemeluknya di sisi yang lain, tidak jarang menimbulkan benturan-benturan dalam tataran tafsir atau dogma agama maupun dalam tataran aksi. Disadari atau tidak, konflik kemudian menjadi problem kebangsaan dan keagamaan yang tidak bisa hanya diselesaikan lewat pendekatan teologi normatif. Akan tetapi diperlukan pendekatan lain yaitu sikap kearifan sosial di antara kelompok kepentingan dan kalangan pemeluk paham atau agama.

Ayat-ayat yang menyebutkan tentang pluralitas agama, di antaranya adalah QS Al-Baqarah: 62, 111-113, 131-132, QS Al-Maidah:69, QS: Al-Hajj: 17, QS Ali Imran: 19 dan 85, QS an-Nisa': 123, QS al-Ankabut: 46, QS al-Ankabut: 61, surat az-Zukhruf: 87, dan QS Al-Maidah: 48. Saya kutip salah satunya adalah QS al-Maidah: 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ (المائدة: ٤٨)

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Kandungan QS Al-Maidah ayat: 48 ini dapat disimpulkan:

1. Agama itu berbeda-beda dari segi aturan hidupnya dan pandangan hidupnya. Pluralisme tidak berarti agama itu sama. Perbedaan merupakan keniscayaan.
2. Tuhan tidak menghendaki kamu mengikuti agama tunggal. Adanya keragaman agama untuk menguji kita semua ujiannya adalah seberapa banyak kita memberikan kebaikan pada umat manusia. Setiap agama bersaing untuk memperebutkan kebaikan kepada umat manusia
3. Semua agama itu kembali kepada Allah. Adalah tugas dan wewenang Allah untuk menyelesaikan perbedaan di antara berbagai agama. Kita tidak boleh mengambil wewenang Allah dalam menyelesaikan perbedaan agama termasuk dengan fatwa (Jalaluddin Rakhmat, 2006: 53).
Rasulullah SAW juga ditanya oleh seorang sahabat, tentang agama yang paling dicintai oleh Allah SWT, sebagaimana teks hadits berikut:

عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأديان أحب إلى الله عز

وجل ؟ قال : « الحنيفية السمحة »

Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: Rasul ditanya, agama apa yang paling dicintai oleh Allah?. Rasul menjawab: Agama yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kebatilan dan agama yang penuh dengan toleransi (HR Dailami).

INTERNALISASI NILAI-NILAI MULTIKULTURAL DAN PLURALISME DALAM PENDIDIKAN AGAMA

Cara-cara yang dilakukan lembaga-lembaga pendidikan untuk menginternalisasikan nilai-nilai multikultural dan pluralitas dalam pendidikan agama agar tercipta kerukunan antar umat beragama dengan melalui berbagai usaha, di antaranya: (1) mengembangkan rasionalisasi pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan dengan pendidikan agama, sejak dari soal manajemen, penggalangan dana, pembuatan kurikulum, silabus hingga pelaksanaan program-program; (2) membuka kerja sama dengan mereka yang sebelumnya dianggap sebagai saingan atau musuh; (3) membuat standarisasi ajaran-ajaran agama sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya; (4) memberikan peran yang lebih luas kepada mereka yang selama ini

dianggap tergolong awam dalam soal-soal agama (Mujiburrahman, 2008: 70-71).

Ada juga tiga model strategi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk memasukkan konsep multikultural dan pluralistik ke ranah pendidikan agama agar tercipta kerukunan antar umat beragama dalam skala mikro dan makro, yaitu: (1) strategi revolusi, (2) strategi pengasingan diri; (3) strategi dialog.

Strategi pertama; dengan cara memaksakan untuk menanamkan ideologi multikulturalisme dan pluralisme melalui kurikulum mata kuliah pendidikan Agama di kampus; *strategi kedua* yang dikembangkan lembaga pendidikan untuk menyosialisasikan pemikiran multikulturalisme dan pluralisme adalah melakukan pengasingan diri (*self isolation*) dengan cara membuat benteng-benteng pertahanan dengan membangun subkultur-subkultur melalui lembaga-lembaga pendidikan yang secara khusus dikelola oleh lembaga keagamaan seperti sekolah-sekolah Islam, Katolik dan Protestan, mereka berharap nilai-nilai multikulturalisme dan pluralisme dalam ajaran agama dapat dikembangkan. Seperti halnya dengan kedudukan pesantren, konsep "Islamic Village", "Boarding School" dan lembaga pendidikan sejenis yang dapat dijadikan sebagai benteng nilai-nilai keagamaan sebagai sebuah subkultur (John L. Esposito, 1992: 5).

Strategi terakhir adalah keberanian untuk menghadapi keragaman dan berdialog dengan orang yang tidak setuju dengan ideologi multikulturalisme dan pluralisme. Strategi ini memang berat karena dibutuhkan keberanian, kesiapan mental dan bahkan material untuk dapat berdialog dengan baik. Inilah strategi yang paling efektif dibandingkan dengan dua strategi sebelumnya ((Mujiburrahman, 2008: 72).

Di sinilah perlu ditanamkan kepada anak didik akan kesadaran bahwa perbedaan tidak mesti harus berujung pada pertentangan. Perlu mencari titik-titik temu di antara yang berbeda itu. Titik temu tersebut bisa jadi kesadaran akan kepasrahan kepada Tuhan dan kebenaran, dan juga yang melihatnya pada upaya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam hal ini perlu dipertahankan tentang identitas yang unik dari satu agama dan di pihak yang lain ada titik temu yang bisa dijadikan landasan untuk bekerja sama satu sama lain.

Dengan dialog, peserta didik sebagai bagian dari umat beragama mempersiapkan diri untuk melakukan diskusi dengan

peserta didik umat agama lain yang berbeda pandangan tentang kenyataan hidup. Dialog dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menimba ilmu pengetahuan baru tentang agama mitra dialog. Dialog tersebut dengan sendirinya akan memperkaya wawasan kedua pihak dalam rangka mencari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dalam suatu masyarakat.

Ada dua komitmen penting yang harus dipegang oleh pelaku dialog (peserta didik) yang digarisbawahi oleh para ahli (dosen, guru dan peneliti). *Pertama* adalah toleransi, dan *kedua* adalah pluralisme. Akan sulit bagi pelaku-pelaku dialog antaragama untuk mencapai saling pengertian dan respek apabila salah satu pihak tidak bersikap toleran. Karena toleransi pada dasarnya adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan.

Namun dialog yang disusul oleh toleransi tanpa pluralisme tidak akan mencapai kerukunan antar umat beragama yang langgeng. Secara garis besar perlu diberikan pemahaman tentang konsep pluralisme dalam pendidikan agama kepada anak didik oleh pendidik atau dosen, sebagai berikut:

Pertama, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Seseorang bisa dianggap sebagai sosok yang pluralis apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, kalau pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat aktif dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan.

Kedua, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realita di mana aneka ragam agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Ambil misal, di kota Pekalongan. Kota Pekalongan merupakan kota kosmopolitan. Di kota ini terdapat orang Kristen, Muslim, Hindu, Budha, bahkan ada orang yang tanpa agama. Namun interaksi positif antar penduduk ini, khususnya di bidang agama, sangat minimal, walaupun ada.

Ketiga, konsep pluralisme tidak disamakan dengan relativisme. Seorang relativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut "kebenaran" atau "nilai" ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakatnya.

Sebagai konsekuensi dari paham relativisme agama, doktrin agama apapun harus dinyatakan benar. Atau tegasnya "semua agama adalah benar," karena kebenaran agama-agama, walaupun berbeda-beda dan bertentangan satu dengan lainnya, tetap harus diterima.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam paham pluralisme terdapat unsur relativisme, yakni unsur yang tidak mengklaim kepemilikan tunggal (monopoli) atau suatu kebenaran, apalagi memaksakan kebenaran tersebut kepada pihak lain. Paling tidak, seorang pluralis akan menghindari sikap absolutisme yang menonjolkan keunggulannya terhadap pihak lain.

Konsep relativisme ini menerangkan bahwa apa yang dianggap baik dan buruk, benar atau salah, adalah relatif, tergantung kepada pendapat tiap individu, keadaan setempat, atau institusi sosial dan agama. Oleh karena itu, konsep ini tidak mengenal kebenaran absolut atau kebenaran abadi.

Keempat, pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama tersebut. Contoh, Mani, pencetus agama Manichaeisme pada abad ketiga, dengan cermat mempersatukan unsur-unsur tertentu dari ajaran Zoroaster, Budha, dan Kristen. Bahkan apa yang dikenal sebagai *New Age Religion* (Agama Masa Kini), adalah wujud nyata dari perpaduan antara praktik Yoga Hindu, meditasi Budha, tasawuf Islam, dan mistik Kristen. Demikian pula dengan Bahaisme yang didirikan pada pertengahan abad ke-19 sebagai agama persatuan oleh Mirza Ali Nuri yang dikenal dengan *Bahaullah*. Sebagai elemen baru yang didirikan di Iran diambil dari agama Yahudi, Kristen, dan Islam (Alwi Shihab, 1999: 41-43).

SIMPULAN

Konsep multikulturalisme dan pluralisme ini memang sudah wajar diterapkan di dunia pendidikan Indonesia, khususnya di mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan agama dengan harus bersyaratkan pada satu hal, yaitu komitmen yang kokoh dari peserta didik sebagai pemeluk agama ke agamanya masing-masing. Seorang multikulturalis dan pluralis dalam berinteraksi dengan beraneka ragam agama, suku, budaya, dan bahasa tentunya tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar dan menghormati mitra dialognya. Tapi yang paling terpenting ia harus *committed* terhadap agama yang

dianutnya. Merupakan tanggung jawab kita bersama untuk membudayakan sikap keterbukaan, menerima perbedaan, dan menghormati kemajemukan agama, dibarengi loyalitas dan komitmen terhadap agama masing-masing melalui proses pembelajaran dan internalisasi nilai-nilai agama di lingkungan lembaga pendidikan dengan cara memperbaiki materi pembelajaran agama dan relevansinya bagi anak didik, menguasai strategi pembelajarannya, dan bahan bacaan materi pelajaran yang dapat mendukung perkembangan keagamaan peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- At-Thabari, 2000. *Jamiul Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz 24. Riyadh: Muassah ar-Risalah.
- Baidhaw, Zakiyuddin. 2002. *Ambivalensi agama, Konflik dan Nirkekerasan*. Yogyakarta: Nesfi.
- Esposito, John L. 1992. *The Islamic Threat, Myth or Reality?*. Oxford: University Press
- Fitri, Susi. "Multikulturalisme". dalam <http://susvie.wordpress.com/2008/08/11/multikulturalisme/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2010.
- Ichtiyanto. 2005. *Masyarakat Majemuk dan Kerukunan Hidup Beragama dalam Meretas Wawasan & Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI.
- Mudzhar, M. Atho. 2004. "Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pemimpin agama dalam rangka keharmonisan hubungan antar umat beragama" dalam "*Damai di Dunia Damai untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama.*" Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Depag RI.
- . 2005. *Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke depan (Tinjauan dari aspek Keagamaan dalam Meretas Wawasan & Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia)*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI.

- Mujiburrahman. 2008. *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan ideologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasikun. 1989. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nuhaiz, Ahmad Zaki. "Sejarah Pluralisme". Dalam http://ilmu.filsafat.ugm.ac.id/download/pec/PEC-2010_Ahmad_Dzaki_Nuhaiz_A.pdf, diakses pada tanggal 24 Juli 2010.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2006. *Islam dan Pluralisme: Akhlak al-Qur'an menyikapi Perbedaan*. Jakarta: PT Serambil Ilmu Semesta.
- Shihab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Tterbuka Dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Toha, Anis Malik. 2005. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif.
- 2008. "Wacana Kebenaran Agama Dalam Perspektif Islam (Telaah Kritis Gagasan Pluralistik Agama)." Pasuruan: Makalah Workshop Pemikiran Islam dan Pemikiran Barat.